

BAB II LANDASAN

TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Tahun
1	Damay Rusli, Anwar Sanusi, Dandan Haryono, dan Dian Andriani	Efektivitas Program Percepatan Peningkatan Tata Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Permukiman Wilayah Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya	2021
2	Cahyo	Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di Bidang Irigasi.	2017
3	Apriyanal dan Yanuardi	Pemberdayaan Masyarakat dalam <i>Water Resources and Irrigation Sector</i> Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. <i>Management Program (WISMO)</i> Studi kasus d	2016
4	Merita Ayu Indrianti, Karmila Oliy	Dampak Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-Tgai) Secara Partisipatif Terhadap Ketahanan Pangan Nasional Di Kabupaten Bone Bolango	2018
5	Lalu Hanis Burhanudin1, Muhammad Atha' Iqbal2, Salmi Yuniar Bahri	Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani.	2022

6	Lidwina Putri Astani, Intan Supraba, Rachmad	Analisis Kebutuhan Air Domestik Dan Non Domestik Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta	2021
7	Muhammad Qurais Shihab, Lily Montarchid L, Ery	Studi Optimasi Pemanfaatan Air Irigasi Pada Daerah Irigasi Gumbasan Kabupaten Sigi Menggunakan Program Linier	2021
8	Novia Elvan Leni, Ida Widianingsih, Slamet Usman	Analisis Stakeholders Dalam Tata Kelola Air Untuk Pertanian (Studi Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat)	2021
9	Dwi Ariyani	Variabilitas Curah Hujan Dan Suhu Udara Serta Pengaruhnya Terhadap Neraca Air Irigasi Di Daerah Aliran Sungai Ciliwung	2017
10	Heru Ernanda, Idah Andriyani, Indarto	Desain Sistem Manajemen Aset Untuk Jaringan Irigasi Tersier	2018
11	Kiki Frida Sulistiyani, Danang Bimo Irianto	Optimasi Pola Tata Tanaman Untuk Peningkatan Luas Layanan Pada Daerah Irigasi Saddang	2021
12	Yunan Eko Nugroho, Agus Setiyono	Pengaruh Pengembangan Irigasi Permukaan Terhadap Irigasi Rawa Di Daerah Irigasi Pali	2021
13	Hanif Rafif, Tri Budi Prayogo	Studi Efisiensi Hasil Perubahan Sistem Jaringan Irigasi Berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) Pada Daerah Irigasi Kajar 2D, Kajar 2E, Kajar 2F, Dan Kajar 2G Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	2021

14	Trisniati	Kajian Optimalisasi Penggunaan Air Irigasi Di Daerah Irigasi Berambai Makmur Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat	2016
15	Joko Suparmanto, Sutirto	Pemanfaatan Air Daerah Aliran Sungai (DAS) Wae Bobo Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Irigasi Guna Meningkatkan Hasil Pertanian Di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa	2019

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pertanian

Tahapan-tahapan pembangunan pertanian selama ini dilakukan oleh pemerintah belum mengalami kemajuan yang pesat. Untuk itu, dibutuhkan terobosan-terobosan baru serta keberanian untuk melakukan reformasi agraria. Masa mendatang pembangunan seyogyanya mengacu pada kaidah *people driven* (menggerakkan orang) jika ingin mewujudkan suatu pola pembangunan yang berkeadilan dan bertanggungjawab. Perlunya meletakkan manusia petani Indonesia, pertanian, dan pedesaan sebagai landasan strategi pembangunan nasional yang dinamis untuk pembangunan yang berkeadilan dan bertanggungjawab.

Suatu kebijakan pembangunan yang baik harus mengandung tiga unsur, yaitu: *ecological security*, *livelihood security*, dan *food security*. Sektor pertanian memiliki peran dalam pembangunan nasional sebagai: (a) pemasok bahan kebutuhan pangan dan bahan baku industri, (b) pengendali stabilitas harga, (c) penyedia lapangan kerja, dan (d) sumber devisa. Dalam rangka melaksanakan peran strategis tersebut, sektor pertanian berupaya untuk terus memperbaiki kinerja pembangunannya. Pembangunan pertanian diartikan serangkaian berbagai upaya untuk mengembangkan kapasitas masyarakat pertanian, khususnya

memberdayakan petani, peternak, dan nelayan, agar mampu melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif secara mandiri.

Membantu sektor pertanian mencapai tujuan, maka sektor-sektor lain diarahkan pada tujuan yang sama. Sektor prasarana dan perhubungan diarahkan pada tujuan yang sama yaitu menunjang sektor pertanian. Maka perbaikan, pemeliharaan dan perluasan irigasi mendapat prioritas pertama, sesuai dengan kenyataan bahwa air merupakan unsur mutlak untuk sebagian besar hasil-hasil pertanian. Telah diakui bahwa sumber daya irigasi memainkan peran utama dalam pengentasan kemiskinan dengan memastikan pembangunan pertanian, memperluas kesempatan mata pencaharian dan lapangan kerja.

Usaha pokok pembangunan pertanian akan terus ditingkatkan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Tujuannya bukan saja untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan ekspor tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan sebagian besar rakyat yang terlibat dalam pembangunan pertanian. Dengan pembangunan pertanian maka akan terangkat harkat dan martabat rakyat pedesaan. Pembangunan dalam sektor pertanian sangat menentukan dalam ketahanan pangan nasional sekaligus menentukan ketahanan bangsa. Penduduk Indonesia tahun 2025 akan mencapai 300 juta lebih, ketahanan nasional akan terancam bila pasokan pangan sangat tergantung dari impor secara terus menerus. Hal ini juga adanya strategi dalam proses industrialisasi pertanian juga memproduksi bahan baku industri pertanian untuk menunjang pembangunan.

Capaian kinerja pertanian dalam kesejahteraan menunjukkan sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia telah berperan untuk memulai, dan menumbuhkan perekonomian agregat sejak periode 1960an. Contoh keberhasilan nampak pada sisi pangan. Bangsa ini telah memiliki fondasi yang kuat dari suplai khususnya pertanian padi. Fondasi tersebut salah satunya dikukuhkan dengan pembangunan infrastruktur pedesaan yang

bersifat masif terutama sarana irigasi. Sehingga secara resolutif mampu meningkatkan indeks tanam petani (IP)¹ dari satu menjadi tiga bahkan empat.

2.2.2 Irigasi dan Permasalahan Irigasi

Irigasi pada hakekatnya adalah upaya pemberian air kepada tanaman dalam bentuk lengas tanah sebanyak keperluan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi irigasi merupakan salah satu aspek yang menonjol, terutama bagi negara pertanian seperti Indonesia (Pasandran, 1991). Irigasi sangat penting untuk produksi pangan yang cukup, mengingat kenaikan diantisipasi dalam permintaan pangan karena pertumbuhan penduduk dunia. Irigasi dapat menyebabkan perubahan dalam kehidupan dan ketahanan pangan petani.

Ketersediaan keamanan pangan, ases, pemanfaatan dan stabilitas cenderung berubah sebagai akibat dari peningkatan ketersediaan air untuk produksi tanaman dan penggunaan lainnya. Irigasi memiliki dampak langsung pada ketersediaan pangan karena peningkatan produktivitas dan perubahan tanam. Selain itu, irigasi kemungkinan akan meningkatkan stabilitas pasokan makanan karena peran irigasi untuk meingkakan kontrol air, sehingga mengurangi atau menghilangkan dampak yang berpotensi merugikan saat kemarau. Faktor yang mempengaruhi perkembangan irigasi kecil, secara global dibagi menjadi:

1. faktor agroekologi;
2. faktor teknologi budidaya dan
3. faktor sosial ekonomi setempat.

Termasuk faktor agroekologi adalah karakteristik iklim, sumber air, tanah, dan kondisi fisik lahan. Sedangkan faktor teknologi budidaya termasuk pengolahan tanah, varietas tanaman pemeliharaan (termasuk pemupukan) dan panen serta pasca panen. Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap pengembangan irigasi kecil adalah: (1) ketersediaan sarana dan prasarana; (2) kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan harga input dan output hasil pertanian; (3) kelembagaan yang terkait dengan bisnis pertanian.

Menurut laporan Bank Dunia pada 1987 operasi dan pemeliharaan merupakan kendala utama bagi pengembangan irigasi di Indonesia yaitu kurangnya biaya dan kemampuan kelembagaan dalam menangani O&P sangat erat kaitannya dengan rehabilitasi, masalah yang dihadapi sangat erat kaitannya dengan strategi rehabilitasi dan perbaikan sistem irigasi dan investasi irigasi secara menyeluruh.

Biaya yang besar telah dikeluarkan untuk membangun proyek-proyek irigasi skala besar namun seringkali pemanfaatan airnya tidak efisien. Alternatif skala kecil lebih murah dan lebih fleksibel, penggunaan airnya lebih efisien dan memungkinkan petani berperan serta dalam perencanaan dan pengelolannya, bagi petani di daerah kering di mana irigasi sangat penting, alternatif kecil ini akan sangat menarik. Namun peningkatan sistem pertanian tadah hujan dengan konsentrasi air dan pengelolaan bahan-bahan organik lebih penting karena kemampuan investasi petani sangatlah terbatas.

Terbatasnya sumber daya air tanah untuk irigasi pertanian seringkali memunculkan konflik kepentingan yang diakibatkan oleh persaingan dalam penggunaan air antara berbagai pengguna, alih fungsi lahan, hak penggunaan air yang tidak jelas, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan kelemahan dalam kebijakan pengelolaan. Sumberdaya air yang berwawasan konservasi. Pandangan ini

mengidikasikan bahwa permasalahan tidak hanya dalam perspektif mekanis saja namun merupakan satu kesatuan utuh dalam multi aspek, antara lain aspek politik, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pandangan bahwa air untuk irigasi merupakan barang publik menyebabkan masyarakat kurang efisien dalam menggunakan air. Secara ekonomi, ketidakjelasan tentang hak-hak dan kewajiban dalam pemanfaatan air, menyebabkan organisasi asosiasi pemakai air kurang efektif. Mekanisme kelembagaan dalam alokasi sumber daya air yang tidak berfungsi dengan baik akan terus menimbulkan konflik pengalokasian air.

2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya. Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Konteks pemberdayaan sebenarnya terkandung unsur partisipatif yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan yang dimiliki obyek. Proses ini menitikberatkan pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukungnya hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi

ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan. Aspek penting dalam program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf, dan kelompok terabaikan. Memperhatikan dampak dan tidak menciptakan ketergantungan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi: (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. (2) memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. (3) memberdayakan mengandung arti melindungi yaitu dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

2.2.4 Falsafah Pemberdayaan Masyarakat

Falsafah telah dikembangkan di Amerika Serikat sebagai 3-T yaitu *teach, truth, and trust* (pendidikan, kebenaran dan kepercayaan). Artinya pemberdayaan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran yang telah diyakini, dengan perkataan lain, dalam pemberdayaan, masyarakat dididik untuk menerapkan setiap inovasi yang telah diuji keabsahannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraannya.

Bagi agen pemberdayaan dalam memberdayakan SDM diantaranya dapat menganut falsafah pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan menurut ajaran ini dapat dilakukan oleh agen pemberdayaan

dengan cara terampil didepan peserta didik, memberikan contoh atau keteladanan. Ada saatnya agen pemberdayaan berpartisipasi aktif, ada ditengah bersama-sama dengan klien/ sasaran sehingga mereka mau melakukan perubahan perilaku ke arah yang diinginkan memberikan dorongan atau motivasi sehingga mereka mau dan mampu melakukan perubahan perilaku sebagai hasil dari proses belajar tersebut.

Falsafah demokratis menekankan bahwa pemberdayaan harus dilakukan dalam suasana yang wajar, menyenangkan, demokratis, menjunjung tinggi hak individu terhadap adanya perbedaan, serta menghindari dengan cara paksaan. Hubungan antara agen pemberdayaan dengan sasaran, perlu diciptakan dalam suasana yang harmonis dan saling menghargai. Dengan suasana demokratis tersebut, keberhasilan bukan pada hasil akhir, tetapi proses merupakan hal utama sehingga setiap individu yang menjadi klien/sasaran dapat berdaya secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing.

2.2.5 Prinsip pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat perlu mempertimbangkan berbagai prinsip, yaitu: 1) masyarakat sebagai aktor atau subyek penting dalam proses pemberdayaan; 2) menggunakan sumber yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara efektif, 3) pemberdayaan merupakan program yang berkelanjutan yang dapat bersifat dinamis, berubah, dan memiliki beragam permasalahan.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*); pada kondisi ini pengelolaan dan pada *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk selanjutnya mengembangkan gagasan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Partisipasi (*participation*) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan keberlanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi; merupakan bagian dari program pengelolaan.

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka Mardikanto dan Poerwoko (2013) menuliskan pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip, yaitu:

1. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
2. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat.
3. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya.

2.2.6 Tujuan pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-

orang yang lemah atau tidak beruntung. Artinya pemberdayaan bertujuan untuk membangun manusia agar meningkatkan kualitas dirinya untuk membangun kehidupannya. Baik kehidupan yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif, konatif, afektif, dan psikomotorik masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan.

Kondisi afektif adalah sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadi keberdayaan pada empat aspek tersebut akan dapat memberikan kontribusi pada tercapainya kemandirian. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat.

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial besar bekerja berdasarkan agenda bersama. Penguatan menyangkut

pentingnya perbaikan aksesibilitas petani dan pemangku kepentingan pembangunan pertanian yang lain, baik terhadap sumber inovasi, input usahatani, pasar jaminan harga, serta pengambilan keputusan publik.

2.2.7 Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat terjadi melalui beberapa tahapan, pertama mengembangkan kesadaran awal bahwa dirinya dapat melakukan aktifitas untuk meningkatkan kehidupannya dan memperoleh keterampilan agar mampu bekerja. Kedua, mengalami pengurangan perasaan ketidakmampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan diri. Ketiga, berlatih lebih banyak mengambil keputusan dan mampu memilih sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Sedangkan menurut Mardikanto (2010) ada enam tahapan pemberdayaan yaitu:

1. Pertama, yaitu menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki yang merupakan titik-awal perlunya pemberdayaan;
2. Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan;
3. Ketiga, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan;
4. Keempat, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya;
5. Kelima, peningkatan peran dan kesetiaan oada kegiatan pemberdayaan, yang ditujukan berkembangnya motivasi- motivasi untuk melakukan perubahan;

6. Keenam, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan;
7. Ketujuh, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Apabila tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan tercipta suatu kegiatan pemberdayaan yang baik. dengan dilaluinya tahapan demi tahapan yang ada, masyarakat yang sebelumnya berada dalam ketidakberdayaan akan sedikit demi sedikit terbebas dari belenggu tersebut. Tanpa adanya kesadaran dan kemauan yang besar, pemberdayaan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah maupun dari pihak swasta untuk menangani dan turun langsung dalam proses pemberdayaan (Ayuningtyas, 2014).

2.2.8 Penerima Manfaat

Dalam pengertian “penerima manfaat” ini terkandung beberapa makna bahwa:

1. Berbeda dengan kedudukannya sebagai “sasaran”, masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, fasilitator dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain.
2. Penerima manfaat bukanlah obyek atau “sasaran tembak” yang layak dipandang rendah oleh penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan sekerja dalam mensukseskan pembangunan.
3. Berbeda dengan kedudukannya sebagai “sasaran” yang tidak punya pilihan atau kesempatan untuk menawar setiap materi yang disampaikan, selain harus menerima/mengikutinya,

penerima manfaat memiliki posisi tawar yang harus dihargai untuk menerima atau menolak inovasi yang disampaikan fasilitatornya.

4. Penerima manfaat tidak berada dalam posisi di bawah penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan dalam kedudukan setara dan bahkan sering justru lebih tinggi kedudukannya, dalam arti memiliki kebebasan untuk mengikuti ataupun menolak inovasi yang disampaikan oleh penyuluhnya.
5. Proses belajar yang berlangsung antara penyuluh dan penerima manfaatnya bukanlah bersifat vertikal (penyuluh menggurui penerima manfaatnya), melainkan proses belajar bersama yang partisipatif.

Penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah. Padahal, kegiatan pemberdayaan masyarakat akan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Disamping itu, keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya tergantung pada efektivitas komunikasi antara fasilitator dan masyarakatnya, tetapi sering lebih ditentukan oleh perilaku/kegiatan pemangku kepentingan pembangunan yang lain. Oleh karena itu penerima manfaat pemberdayaan masyarakat dapat dibedakan menjadi pelaku utama yaitu warga masyarakat dan keluarga. Penentu kebijakan yang terdiri dari aparat dan birokrasi pemerintah, pemangku kepentingan yang lain. Beberapa karakteristik penerima manfaat yang perlu dicermati adalah;

1. Karakteristik pribadi, yang mencakup; jenis kelamin, umur, suku, agama, dll.;
2. Status sosial ekonomi, yang meliputi; tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan keterlibatannya dalam kelompok/organisasi kemasyarakatan;
3. Perilaku keinovatifan, yang terdiri dari perintis, pelopor,

penganut dini, penganut lambat dan kelompok yang tidak bersedia berubah;

4. Moral ekonomi masyarakat, yang dibedakan dalam moral subsisten dan moral rasionalitas.

Adapun faktor-faktor yang menghambat penerima manfaat adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya keyakinan akan manfaat yang diperoleh, artinya tidak adanya keyakinan akan manfaat yang diperoleh dapat menghambat penerima manfaat program pemberdayaan.
2. Gaya kepemimpinan kelompok, merupakan gaya perilaku yang dilakukan pemimpin yang dapat menghambat penerima manfaat program pemberdayaan apabila gaya kepemimpinan kelompok tidak baik dan tidak demokratis.
3. Kepercayaan diri. Sikap kepercayaan diri dapat menghambat penerima manfaat program pemberdayaan apabila tidak adanya harapan positif yang penuh keyakinan dalam diri penerima manfaat terhadap aktivitas yang akan ataupun sedang dijalankan.
4. Tingkat pendidikan dan keterampilan dapat menghambat penerima manfaat program pemberdayaan apabila tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki penerima manfaat tergolong rendah dan terdapat ketidakmampuan dalam menjalankan pekerjaannya.

2.2.9 Entitas Pemberdayaan

Ada empat kunci yang perlu diacu dalam rekonstruksi masyarakat melalui pemberdayaan, yakni akses informasi, partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas keorganisasian lokal. Akan tetapi, yang lebih penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah proses, terutama partisipasi dan pembelajaran.

1. Aksesibilitas Informasi

Informasi dan komunikasi merupakan bagian hakiki dari kehidupan manusia, sebagaimana juga manusia merupakan bagian dari masyarakat. Hanya orang atau bangsa yang memiliki banyak informasi yang dapat berkembang dengan pesat. Dengan informasi orang dapat mengetahui apa yang telah, sedang dan akan terjadi di suatu masyarakat. Sehingga orang dengan mudah mengetahui apa yang akan dilakukan dan diperbaiki. Aksesibilitas informasi merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan kelancarannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal demikian amat penting untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat. Golongan petani yang inovatif biasanya banyak memanfaatkan beragam sumber informasi, seperti: perguruan tinggi, lembaga penelitian, dinas-dinas terkait, media massa, tokoh-tokoh masyarakat setempat maupun dari luar, maupun lembaga-lembaga komersial. Berbeda dengan golongan kurang inovatif, umumnya hanya memanfaatkan informasi dari tokoh-tokoh setempat, dan relative sedikit memanfaatkan informasi dari media masa.

2. Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu program kegiatan. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. melalui partisipasi berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan

pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat. Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat. Pentingnya partisipasi adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam program terbilang baik dimana masyarakat berperan aktif dari awal hingga akhir, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat yang baik maka tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi dalam pembangunan:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Umumnya setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak yang umumnya lebih miskin untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Lapisan yang di atasnya yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya dalam banyak hal memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan masyarakat yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati dalam

jangka panjang.

3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Hal ini untuk memperoleh umpan balik tentang masalah- masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi sangat diperlukan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan. Namun partisipasi dalam pemanfaatan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator.

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, Beberapa kesempatan yang dimaksud adalah kemauan penguasa melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan pemanfaatan program. Kesempatan mendapatkan informasi pembangunan, kesempatan memanfaatkan sumber daya.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, Kemampuan yang dimaksud adalah untuk menemukan dan memahami kesempatan untuk membangun atau pengetahuan tentang untuk memperbaiki hidupnya.

Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan sumberdaya yang tersedia.

3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, Kemauan untuk berpartisipasi utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya yang menyangkut sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan, sikap terhadap penguasa, sikap untuk selalu memperbaiki mutu hidup, sikap kebersamaan untuk memecahkan masalah, sikap kemandirian atas kemampuannya.
4. Akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai perilaku individu atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka melalui pemberian alasan atas tindakan. Definisi ini membawa konsekuensi bahwa setiap individu atau organisasi wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagai wujud akuntabilitas individu atau organisasi. Konsep ini guna meningkatkan kepercayaan dan keterimaan satu sama lain dalam organisasi. Akuntabilitas dalam pemberdayaan bisa dikaitkan sebagai upaya mengendalikan usaha-usaha kelompok karena kontribusi individu tidak teridentifikasi. Tim yang kinerjanya tinggi mengurangi kecenderungan dengan tetap memberikan tanggung jawab baik ditingkat individu maupun tingkat lain. Tim yang sukses memberi tanggung jawab individu dan tanggung jawab bersama demi tujuan bersama.
5. Kapasitas Organisasi Lokal. Kapasitas organisasi lokal berkaitan dengan kemampuan bekerjasama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk

memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Pengembangan kapasitas manusia dapat berupa pengembangan wawasan dan tingkat pengetahuan, peningkatan kemampuan untuk merespon dinamika lingkungannya, peningkatan *skill*, peningkatan akses pada informasi, peningkatan akses dalam proses pengambilan keputusan. Aspek bersifat mendasar dalam organisasi lokal yaitu perolehan air, alokasi air, sistem pemeliharaan, pengadaan sumberdaya, menghadapi pertentangan untuk menampung dan menengahi.

Penguatan organisasi lokal dalam penelitian terdahulu bisa dilakukan dengan melalui berbagai strategi seperti: *pertama*, revitalisasi organisasi lokal. Hal ini dimaksudkan bahwa organisasi lokal yang sudah ada diperkuat lagi dengan cara meneguhkan kembali aturan main di internal organisasi tersebut. Peneguhan kembali mengenai aturan ini sebagai upaya agar anggota dalam organisasi mempunyai loyalitas dan komitmen yang tinggi terhadap lembaga sehingga organisasi bisa tetap ada dan bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan anggotanya. Revitalisasi organisasi juga dapat meningkatkan kapasitas bagi pengurus terutama dalam meningkatkan *skill* anggota dalam manajemen organisasi tersebut. *Kedua*, pengembangan aset, aksesibilitas dan kapasitas. Upaya yang dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana organisasi, membangun jaringan kemitraan strategis, pelatihan organisasi dan managerial serta kaderisasi. *Ketiga*, peningkatan kapasitas petani. *Keempat*, fasilitasi dan promosi.

2.2.10 Faktor Pendukung dan Penghambat Program

Faktor sosio-budaya untuk melihat faktor yang dinilai berpengaruh besar terhadap program perbaikan pengelolaan irigasi kecil berbasis

masyarakat. Beberapa aspek sosio-budaya tersebut yaitu: kompetensi petani, tata nilai yang diberikan, kepemimpinan efektif, dan struktur sosial, keorganisasian dan manajemen kehidupan masyarakat pedesaan dalam memberikan dukungan terhadap perbaikan dan pengembangan pengelolaan irigasi kecil berbasis masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terdapat sejumlah hambatan kebijakan dan kelembagaan dalam menerapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil. Hambatan ini antara lain adalah terbatasnya komitmen dan pemahaman manajer senior dan para penentu kebijakan terhadap prinsip dan keuntungan yang bisa diperoleh dari pendekatan pemberdayaan masyarakat serta kurangnya orientasi pada klien oleh aparat pemerintah. Selain itu, hambatan finansial masih membatasi penemuan keputusan tingkat lokal. Hambatan lain adalah kekurangan data monitoring dan evaluasi serta masih adanya struktur pemerintahan dan proses perencanaan yang bersifat membatasi.

Disamping terdapatnya faktor pendukung, dalam pembangunan masyarakat desa tentu saja juga dijumpai faktor-faktor penghambat yang merupakan masalah yang mengganggu jalannya pembangunan masyarakat. faktor-faktor pendorong yang sudah dijelaskan sebelumnya juga dapat dikatakan sebagai faktor penghambat apabila keberadaannya justru bertentangan dengan keinginan akan pembangunan. Berikut ini disajikan beberapa faktor penghambat.

Rendahnya rata-rata tingkat pendidikan merupakan faktor sosial budaya yang menghambat pembangunan desa. Rendahnya tingkat pendidikan maka masyarakat desa sering kurang adaptif terhadap modernisasi. Mereka cenderung mempertahankan pola-pola yang sudah ada, yang sudah pasti yang mereka kenal dengan baik. Tawaran terhadap suatu perubahan dianggap sebagai suatu hal yang belum pasti dan banyak mengundang resiko. Adanya sikap yang demikian cenderung menganggang masyarakat desa bersifat statis.

2.2.11 Severity Index

Salah satu hal yang dilakukan guna tercapainya sasaran adalah dengan mengkaji peristiwa yang dapat berdampak buruk bagi sasaran yaitu resiko. *Severity Index* merupakan salah satu cara untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap suatu kegiatan proyek atau sebuah kinerja. *Severity Index* bertujuan untuk mendapatkan hasil kombinasi penilaian probabilitas dan dampak resiko. Persamaan *Severity Index* adalah sebagai berikut:

$$SI = \frac{\sum_{i=0}^4 a_i x_i}{4 \sum_{i=0}^4 x_i} (100\%)$$

Gambar 2.1 Persamaan *Severity Index*

Keterangan:

a_i = konstanta penilaian

x_i = frekuensi responden

$I = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, n$

x_0, x_1, x_2, x_3, x_n adalah respon frekuensi responden

$a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 4$

x_0 = frekuensi respinden “sangat rendah”

x_1 = frekuensi respinden “rendah”

x_2 = frekuensi respinden “cukup tinggi”

x_3 = frekuensi respinden “tinggi”

x_4 = frekuensi respinden “sangat tinggi”

Hasil nilai *Severity Index* adalah berupa presentase dengan kategori berdasarkan Majid dan Caffer (1997) kategori nilai SI ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Kategori Nilai *Severity Index* Untuk Frekuensi (*Probability*)

No	Kategori	Nilai Presentase SI	Nilai
1	Sangat Sering (SS)	$87,5\% \leq SI \leq 100\%$	5
2	Sering (S)	$62,5\% \leq SI \leq 87,5\%$	4
3	Cukup (C)	$32,5\% \leq SI \leq 62,5\%$	3
4	Jarang (J)	$12,5\% \leq SI \leq 32,5\%$	2
5	Sangat jarang (SJ)	$0\% \leq SI \leq 12,5\%$	1

2.2.12 Menghitung menggunakan Excel

Menghitung adalah bagian integral dalam menganalisis data baik dalam probabilitas maupun yang lain. Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik (angka). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus dalam lembar spreadsheet. Data dalam lembar spreadsheet dapat dihitung dan diolah secara akurat menggunakan rumus-rumus tertentu yang tersedia. Microsoft Excel menyediakan beberapa teknik yang bisa digunakan dalam menghitung sel, baris, ataupun kolom data. Penelitian ini juga menggunakan Microsoft Excel untuk membantu menghitung dan menganalisis data dengan menggunakan persamaan *Severity Index*. Dari sekian banyak rumus yang dapat digunakan pada Microsoft Excel, umumnya yang akan sering digunakan pada penelitian ini ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, SUM, COUNTIF, IF dan lain-lain.